



**PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN KUALITAS  
LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(STUDI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN KUPANG)**

**Christian Timotius Peilouw<sup>1</sup>, Dwi Dayanti Oktavia<sup>2</sup>, Agusta Amanda Wulandari<sup>3</sup>,  
Chyntia Febriliany Latuan<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Politeknik Negeri Kupang, Akuntansi

Lasiana, Kelapa Lima, Kupang City, East Nusa Tenggara 85258

<sup>2</sup>STIE Kertanegara Malang, Manajemen

Jl. Cengger Ayam I No.5, RW.02, Tulusrejo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141

<sup>3</sup>Politeknik Negeri Kupang, Akuntansi

Lasiana, Kelapa Lima, Kupang City, East Nusa Tenggara 85258

<sup>4</sup>Politeknik Negeri Kupang, Akuntansi

Lasiana, Kelapa Lima, Kupang City, East Nusa Tenggara 85258

---

**Article history:**

Received: 2023-02-19

Revised: 2023-02-21

Accepted: 2023-02-22

---

✉ Corresponding Author:

**Name author:** Christian Timotius Peilouw

Tel. 08170478717

E-mail: [christianpeilouw@gmail.com](mailto:christianpeilouw@gmail.com)

**Abstract**

This study aims to find empirical evidence of the effect of the application of public sector accounting and the quality of financial reports on the accountability performance of government agencies. This study uses three variables, namely the application of public sector accounting (X1), quality of financial reports (X2), and accountability of government agency performance (Y). This study was a quantitative study using primary data obtained through a questionnaire. The population of 54 employees of the Regional Financial and Asset Management Agency of Kupang Regency. The sample was taken 35 people using purposive sampling as the sampling technique.

The data analysis method used was data quality test consisting of validity test and reliability test; and classical assumption test consisting of normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test and autocorrelation test. The hypothesis testing technique uses multiple linear regression analysis, coefficient of determination, t-test and F test. The data were processed by using the Statistical Product And Service Solution (SPSS) version 26 program.

The results of this study indicated that partially the application of public sector accounting affects the accountability performance of government agencies, and partially the quality of financial reports affects the performance accountability of government agencies. Meanwhile, the simultaneous application of

public sector accounting and the quality of financial reports had a significant effect on the performance accountability of government agencies

**Keywords:** *Accountability Performance of Government Agencies ; Financial Reports ; Public Sector Accounting*

## 1. Pendahuluan

Setiap negara menginginkan pemerintahan yang dapat berupaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan *Good Governance*. Salah satu prinsip strategis yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah prinsip tata kelola keuangan yang baik diperlukan penguatan sistem dan kelembagaan dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan serta standar penyajian laporan keuangan yang berlaku. Prinsip tata kelola keuangan yang baik akan mempengaruhi kinerja pemerintah yang menyajikan atau yang membuat laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah, dalam hal ini akuntansi sektor publik bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan informasi keuangan secara umum yang lebih berkualitas bagi para pengguna laporan keuangan di dalam rangka menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Dapat dikatakan, akuntansi sektor publik bermaksud memberikan transparansi kepada publik agar hak-hak publik terpenuhi, dalam hal ini instansi pemerintah perlu memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini didapatkan dari laporan pengelolaan keuangan yang disusun dengan akuntansi untuk sektor publik. Laporan keuangan yang baik dan berkualitas akan mempengaruhi kinerja pemerintah yang menyajikan atau yang membuat laporan keuangan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Agar dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, laporan keuangan pemerintah menurut PP No. 71 Tahun 2010 harus memenuhi empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya laporan keuangan yang baik pusat maupun daerah, sudah seharusnya dikelola dengan baik, transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Adanya laporan keuangan tersebut menjadikannya sebagai sumber informasi untuk menentukan dan mengambil kebijakan dalam mengembangkan dan menumbuhkan wilayahnya.

Penyajian laporan keuangan yang baik didasarkan pada kinerja akuntabilitas yang menyampaikan serta membuat laporan keuangan tersebut. Berdasarkan peraturan perundangan berupa Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 15 juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab (Pamungkas, 2012).

Dalam penelitiannya, Santoso dan Pabelum (2008) mengungkapkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya *good governance*. Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik. Dalam bidang ekonomi, perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi, sedangkan dalam bidang politik perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penerapan akuntansi sektor publik yang baik oleh instansi pemerintah serta kualitas laporan keuangan yang optimal dari pihak internal maupun eksternal diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah dapat optimal. Perbaikan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diharapkan akan berimplikasi pada minimalnya praktik korupsi sehingga diharapkan *good governance* dapat diwujudkan oleh pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah (Wina dan Khairani, 2015).

Penelitian ini terkait dengan pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya pada Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kupang dikarenakan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kupang tahun anggaran 2016-2020 memperoleh hasil opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam 5 tahun terakhir Kabupaten Kupang belum sekalipun memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Dalam proses untuk meraih opini WTP dari BPK, Pemda di NTT perlu memperhatikan secara baik proses inventarisasi

aset daerahnya. Caranya yaitu data aset harus menyesuaikan catatan riil pemerintah daerah (sumber: ntt.bpk.go.id). Menurut Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT, Lidya Kurniawati Christyana, masalah yang sering terjadi selama ini adalah tata kelola aset atau barang milik negara atau barang milik daerah. Kesalahan pencatatan akun pada laporan keuangan berupa aset tetap dalam hal ini aset Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) yang seharusnya dicatat sebagai penambah pada aset induk namun dicatat sebagai aset baru.

Selain itu, permasalahan yang terjadi adalah waktu penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Mengingat LAKIP merupakan media pertanggungjawaban dan juga menjadi bahan evaluasi untuk kinerja instansi pemerintah, maka LAKIP harus dibuat secara tertulis dan disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Namun penyampaian LAKIP TA 2020 pada instansi tersebut dilakukan setelah lebih dari 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir meskipun presentase LAKIPnya adalah 93,57% dan termasuk kategori sangat baik.

Fenomena ini menunjukkan bahwa masih kurangnya pemahaman terhadap akun-akun dalam laporan keuangan sehingga mengakibatkan penurunan kualitas laporan keuangan dan terhambatnya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini mendorong peneliti melakukan penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui apakah penerapan standar akuntansi sektor publik sudah dijalankan dengan baik dan benar sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, dan apakah ada pengaruhnya dengan akuntabilitas kinerja pada instansi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul "Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kupang".

## **2. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah digambarkan di atas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kupang.

H2 : Kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kupang.

H3 : Akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kupang.

## **3. Metode dan Analisis Data**

### **Metode**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kuesioner dan dokumentasi. Teknik kuesioner dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis dengan menyebarkan kuesioner kepada pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kupang. Dokumentasi dengan memasukan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2020 kedalam kuisisioner sebagai pertanyaan untuk memperoleh data. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kupang yang berjumlah 54 orang. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling, dengan metode purposive sampling. Pertimbangan pengambilan sampel dalam penelitian diantaranya adalah pegawai yang memiliki pengalaman dalam bidang akuntansi, berkompeten dalam administrasi keuangan, serta telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 35 orang. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket atau kuesioner (*questionnaires*). Prosedur pengembangan instrumen dalam penelitian ini dimulai dari variabel kemudian menentukan sub variabel dan selanjutnya menentukan indikator. Dari indikator tersebut kemudian dijadikan item-item pertanyaan. Responden diminta memberikan pendapat setiap butir pertanyaan diukur menggunakan skala Likert dari 1 s/d 5, mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Pengujian Instrumen dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas.

### **Analisis Data**

Tahap-tahap dalam menganalisis data adalah melakukan uji kualitas data, setelah memperoleh data dari responden asli lalu membuat tabulasi profil responden, uji asumsi klasik dan menguji hipotesis dengan analisis berganda.

#### 4. Results

##### Uji Kualitas Data

Berdasarkan Tabel 4.6, diketahui seluruh pertanyaan bersifat valid. Alternatif ketentuan validitas suatu pertanyaan pada kuesioner juga dapat dibandingkan dengan nilai R tabel. Nilai R tabel dengan derajat bebas 33 adalah R tabel = 0,3338.

**Tabel 1. Hasil Uji Validitas**

Variabel	Butir Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Status
Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1)	X1_1	0,691**	0,3338	Valid
	X1_2	0,707**	0,3338	Valid
	X1_3	0,720**	0,3338	Valid
	X1_4	0,756**	0,3338	Valid
	X1_5	0,716**	0,3338	Valid
	X1_6	0,714**	0,3338	Valid
	X1_7	0,709**	0,3338	Valid
Kualitas Laporan Keuangan (X2)	X2_1	0,640**	0,3338	Valid
	X2_2	0,610**	0,3338	Valid
	X2_3	0,447**	0,3338	Valid
	X2_4	0,521**	0,3338	Valid
	X2_5	0,545**	0,3338	Valid
	X2_6	0,801**	0,3338	Valid
	X2_7	0,758**	0,3338	Valid
	X2_8	0,675**	0,3338	Valid
	X2_9	0,664**	0,3338	Valid
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	Y_1	0,735**	0,3338	Valid
	Y_2	0,360**	0,3338	Valid
	Y_3	0,784**	0,3338	Valid
	Y_4	0,784**	0,3338	Valid
	Y_5	0,786**	0,3338	Valid
	Y_6	0,343**	0,3338	Valid
	Y_7	0,436**	0,3338	Valid
	Y_8	0,769**	0,3338	Valid
	Y_9	0,349**	0,3338	Valid
	Y_10	0,406**	0,3338	Valid

(Sumber : Data Primer yang diolah SPSS V.26.0, 2021)

##### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dari variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1), Kualitas Laporan Keuangan (X2) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1)	0,904	0,60	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan (X2)	0,883	0,60	Reliabel
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	0,865	0,60	Reliabel

(Sumber : Data Primer yang diolah SPSS V.26.0, 2021)

Berdasarkan Tabel 4.7, diketahui bahwa variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1), Kualitas Laporan Keuangan (X2) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) memiliki nilai *cronbach alpha*

lebih dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua konsep pengukur variabel-variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur dalam pengujian statistik.

### Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda harus melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu karena regresi linear berganda harus memenuhi asumsi-asumsi yang ditetapkan agar menghasilkan nilai-nilai koefisien sebagai penduga yang tidak bias.

#### 1. Uji Normalitas

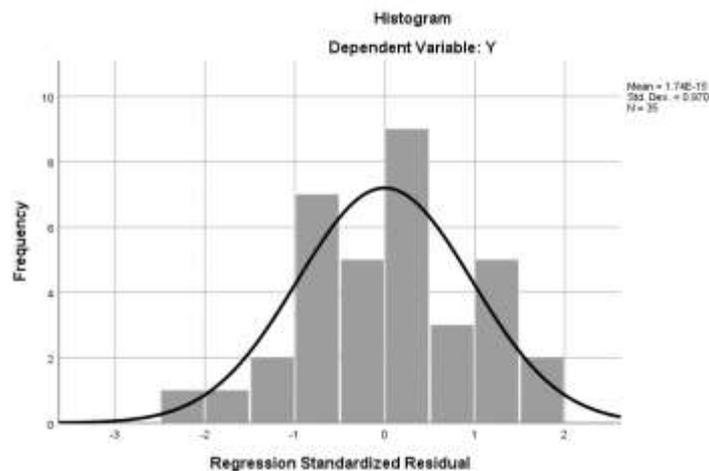
**Tabel 3 Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.19354907
Most Extreme Differences	Absolute	.068
	Positive	.068
	Negative	-.056
Test Statistic		.068
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

(Sumber : Data Primer yang diolah SPSS V.26.0, 2021)

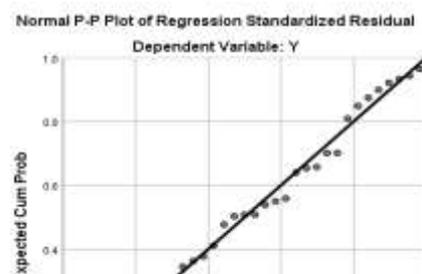
Berdasarkan Tabel 4.8. diketahui nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200, karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi, yakni 0,05. Hal ini berarti asumsi normalitas terpenuhi.

Hasil uji normalitas juga dapat dilihat dari 2 buah diagram yaitu histogram dan P-P Plots.



**Gambar 1 Histogram (Sumber : Data Primer yang diolah SPSS V.26.0, 2021)**

Pada hasil uji histogram, perhatikan garis melengkung keatas seperti membentuk gunung. Apabila garis tersebut membentuk gunung dan terlihat sempurna dengan kaki yang simetris, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian berdistribusi normal. Berdasarkan Gambar 1, maka dapat diketahui bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

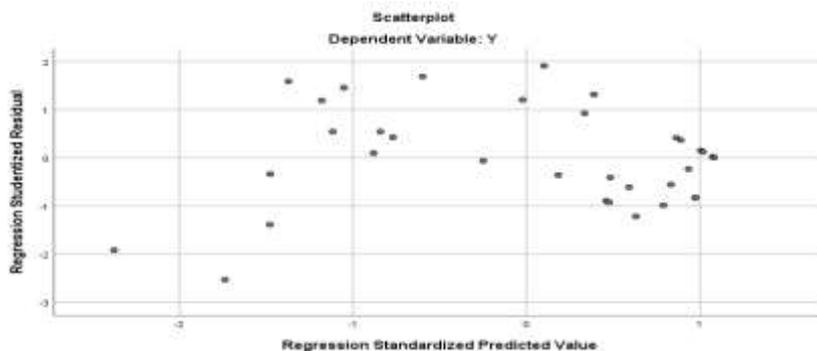


**Gambar 2. P-P Plots (Sumber : Data Primer yang diolah SPSS V.26.0, 2021)**

Pada hasil uji normal probability plots, perhatikan titik-titik dan garis diagonal. Jika titik-titik mengikuti garis diagonal dari titik 0 dan tidak melebar terlalu jauh, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Namun, jika titik-titik melebar terlalu jauh, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan Gambar 2, maka dapat diketahui bahwa data berdistribusi normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara SRESID pada sumbu Y, dan ZPRED pada sumbu X. Jjika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



**Gambar 3. Grafik Scatterplot (Sumber : Data Primer yang diolah SPSS V.26.0, 2021)**

Berdasarkan Gambar 3, tidak terdapat pola yang begitu jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Gambar 4.4 menunjukkan bahwa titik-titik yang ada menyebar secara acak, tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas. Oleh karena itu, model regresi dikatakan tidak mengalami heteroskedastisitas.

3. Uji Multikolonieritas

Pendeteksian terhadap multikolonieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflating Factor* (VIF) dari hasil analisis regresi. Jika nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* diatas 0,1 maka tidak terdapat gejala multikolinearitas.

**Tabel 4. Hasil Uji Multikolonieritas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.002	.340			
X1	.234	.079	.301	.666	1.503
X2	.570	.086	.675	.666	1.503

(Sumber : Data Primer yang diolah SPSS V.26.0, 2021)

Berdasarkan Tabel 4. masing-masing nilai VIF tidak lebih besar dari 10 dan nilai tolerance diatas 0.1 maka tidak terdapat gejala multikolinearitas.

#### 4. Uji Autokorelasi

Cara untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan pengujian *Durbin-Watson* (d). Hasil perhitungan *Durbin-Watson* (d) dibandingkan dengan nilai d tabel pada  $\alpha = 0.05$ . Tabel d memiliki dua nilai, yaitu nilai batas atas ( $d_U$ ) dan nilai batas bawah ( $d_L$ ) untuk berbagai nilai n dan k.

Jika  $d < d_L$ ; maka terjadi autokorelasi positif

$d > 4 - d_L$ ; maka terjadi autokorelasi negative

$d_U < d < 4 - d_U$ ; maka tidak terjadi autokorelasi

$d_L \leq d \leq d_U$  atau  $4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$ ; maka pengujian tidak meyakinkan.

**Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.884 <sup>a</sup>	.782	.768	.19951	2.109
a. Predictors: (Constant), X2, X1					
b. Dependent Variable: Y					

(Sumber : Data Primer yang diolah SPSS V.26.0, 2021)

Berdasarkan Tabel 5. nilai kritis dari  $d_L$  dan  $d_U$  untuk nilai  $\alpha = 0.05$ ,  $k = 3$  dan  $n = 35$  adalah  $d_L = 1,34332$  dan  $d_U = 1,58382$ . Apabila dimasukkan ke dalam rumus kriteria maka :  $1,58382 < 2,109 < 4 - 1,58382$  atau  $1,58382 < 2,109 < 2,41618$ , maka keputusannya adalah tidak terjadi autokorelasi.

#### Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6. menyajikan nilai koefisien regresi, serta nilai statistik t untuk pengujian pengaruh secara parsial.

**Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.002	.340		2.951	.006
	X1	.234	.079	.301	2.974	.006
	X2	.570	.086	.675	6.664	.000
a. Dependent Variable: Y						

(Sumber : Data Primer yang diolah SPSS V.26.0, 2021)

Berdasarkan Tabel 6. diperoleh persamaan regresi linear sebagai berikut berikut.

$$Y = 1,002 + 0,234X1 + 0,570X2 + e$$

Dimana :

Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

X1 : Penerapan Akuntansi Sektor Publik

X2 : Kualitas Laporan Keuangan

e : Error

Berdasarkan Tabel 6. disajikan kembali nilai koefisien regresi untuk masing-masing variabel bebas. Untuk Variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik bernilai 0,234 (bernilai positif), berarti Penerapan Akuntansi Sektor Publik memiliki pengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penerapan Akuntansi Sektor Publik yang semakin baik berdampak positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Variabel Kualitas Laporan Keuangan bernilai 0,570 (bernilai positif), berarti Kualitas Laporan Keuangan memiliki pengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kualitas

Laporan Keuangan yang semakin baik berdampak positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis bertujuan untuk menjawab apakah hipotesis yang disajikan dalam penelitian ini diterima atau ditolak. Cara untuk mengetahui kebenaran hipotesis, maka dilakukan pengujian secara statistik yang meliputi uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji signifikansi parsial (uji T) dan uji signifikansi simultan (uji F).

1. Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 7. menyajikan nilai koefisien regresi, serta nilai statistik t untuk pengujian pengaruh secara parsial.

**Tabel 7. Hasil Uji T**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.002	.340		2.951	.006
	X1	.234	.079	.301	2.974	.006
	X2	.570	.086	.675	6.664	.000

a. Dependent Variable: Y

(Sumber : Data Primer yang diolah SPSS V.26.0, 2021)

Berdasarkan tabel 7, dapat disimpulkan mengenai hasil uji hipotesis secara parsial variabel independen (X1) sebagai berikut :

Nilai thitung variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik diperoleh sebesar 2,974 lebih besar dari ttabel 2.037 dengan tingkat signifikansi sebesar  $0.006 < 0.05$ , maka hipotesis yang diajukan diterima (**H1 diterima**). Hal ini berarti bahwa Penerapan Akuntansi Sektor Publik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada taraf signifikan  $\alpha = 5\%$ .

2. Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan tabel 7., dapat disimpulkan mengenai hasil uji hipotesis secara parsial variabel independen (X2) sebagai berikut :

Nilai t hitung variabel Kualitas Laporan Keuangan diperoleh sebesar 6,664 lebih besar dari t tabel 2.037 dengan tingkat signifikansi sebesar  $0.000 > 0.05$ , maka hipotesis yang diajukan diterima (H2 diterima). Hal ini berarti bahwa Kualitas Laporan Keuangan secara parsial berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada taraf signifikan  $\alpha = 5\%$ .

3. Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Uji F bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel tak bebas.

**Tabel 8. Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.556	2	2.278	57.233	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1.274	3	.425		
	Total	5.830	5			

a. Dependent Variable: Y  
b. Predictors: (Constant), X2, X1

(Sumber : Data Primer yang diolah SPSS V.26.0, 2021)

Berdasarkan Tabel 4.13, diketahui nilai Fhitung adalah 57,223, dengan nilai Ftabel sebesar 3,28. Jika nilai F hitung (57,223) > Ftabel (3,28) dan nilai sig (0,000) < 0,05, maka disimpulkan bahwa pengaruh simultan dari seluruh variabel bebas (Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan) berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**H3 diterima**).

#### 4. Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi adalah uji yang digunakan untuk mengetahui besaran dalam persen pengaruh variabel independent secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Dari uji koefisien determinasi dihasilkan R<sup>2</sup> sebagaimana dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.884 <sup>a</sup>	.782	.768	.19951
a. Predictors: (Constant), X2, X1				
b. Dependent Variable: Y				

(Sumber : Data Primer yang diolah SPSS V.26.0, 2021)

Berdasarkan Tabel 9. nilai koefisien determinasi R<sup>2</sup> terletak pada kolom R-Square. Diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0.768. Nilai tersebut berarti seluruh variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 76,8%, sisanya sebesar 23,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## 5. Pembahasan

### Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t hitung variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik diperoleh sebesar 2,974 lebih besar dari t tabel 2.037 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.006 < 0.05, maka hipotesis yang diajukan diterima (H1 diterima). Hal ini berarti bahwa Penerapan Akuntansi Sektor Publik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada taraf signifikansi  $\alpha = 5\%$ .

Berdasarkan hasil di atas, maka dapat dikatakan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penerapan akuntansi sektor publik yang baik akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil kuisioner juga menyatakan bahwa instansi terkait telah melakukan analisis transaksi keuangan dengan baik dan telah disertai bukti pendukung serta pencatatan dilakukan secara berurutan sesuai dengan kronologi, namun proses klasifikasi/pengelompokkan pada setiap transaksi yang terjadi di instansi terkait belum maksimal dan pelaporan keuangan yang dilakukan secara konsisten dan periodik belum dapat diwujudkan. Hal ini menunjukkan bahwa instansi terkait perlu meningkatkan jumlah pegawai yang profesional di bidang akuntansi dan secara konsisten dan periodik melakukan pelaporan keuangan. Peningkatan profesionalisme pegawai bisa dilakukan dengan mengikuti atau mengadakan pelatihan akuntansi sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa kinerja merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya good governance dalam pengelolaan organisasi publik. Jadi, tidak salah jika siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik. Kinerja organisasi dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefisienkan hasil dari proses organisasi, yakni perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit serta pertanggungjawaban publik (Bastian, 2010).

Hal ini sejalan dengan penelitian Pamungkas (2012) yaitu penerapan akuntansi sektor publik, berpengaruh terhadap kinerja instansi. Penerapan akuntansi sektor publik memberikan sumbangan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal penyajian informasi pertanggungjawaban mengenai tujuan, fungsi dan obyek pengeluaran.

### Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t hitung variabel Kualitas Laporan Keuangan diperoleh sebesar 6,664 lebih besar dari t tabel 2.037 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 > 0.05, maka hipotesis yang diajukan diterima (**H2 diterima**). Hal ini berarti bahwa Kualitas Laporan Keuangan secara parsial berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada taraf signifikansi  $\alpha = 5\%$ .

Kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena dengan adanya laporan keuangan yang baik dan berkualitas akan berindikasi pada akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang dibuat. Hasil kuisioner juga menyatakan bahwa instansi terkait telah menghasilkan laporan keuangan yang memuat informasi yang memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu dengan baik, namun laporan keuangan dihasilkan belum menyajikan informasi keuangan yang lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa instansi terkait perlu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyajian laporan keuangan dengan mencatat dan menulis transaksi yang terjadi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara lengkap dan mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga meningkat.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Santoso (2008) yang mengatakan bahwa adanya pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap akuntabilitas yaitu secara teoritis penerapan akuntansi sektor publik dan Pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan instansi Pemerintah akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara parsial maupun secara bersama-sama. Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh pada akuntabilitas. Karena dengan adanya laporan keuangan yang baik atau berkualitas akan berindikasi pada akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat.

Hasil penelitian Pamungkas (2012) juga menegaskan bahwa penerapan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja instansi.

### **Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.**

Berdasarkan hasil uji f diperoleh nilai F hitung adalah 57,223, dengan nilai Ftabel sebesar 3,28. Jika nilai F hitung ( $57,223 > Ftabel (3,28)$ ) dan nilai sig ( $0,000 < 0,05$ ), maka disimpulkan bahwa pengaruh simultan dari seluruh variabel bebas (Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan) berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**H3 diterima**).

Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini menunjukkan apabila akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku dalam hal ini penerapan akuntansi sektor publik maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Hasil kuisioner juga menyatakan bahwa instansi terkait telah menghasilkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang digunakan sebahai pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan tahun selanjutnya dengan baik, namun pada pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan belum dilaksanakan secara maksimal dan proses penyampaian LAKIP disampaikan selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir juga belum dapat diwujudkan. Hal ini menunjukkan bahwa instansi terkait perlu memperbaiki proses pengukuran kinerja dan meningkatkan proses penyampaian LAKIP sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Wina (2015) yang mengatakan bahwa semakin tinggi pengaruh akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang semakin baik pula.

Hasil penelitian Pamungkas (2012), Nugraeni (2015) dan Marlina (2018) juga menegaskan bahwa akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### **Koefisien Determinasi**

Nilai koefisien determinasi sebesar 0.768. Nilai tersebut berarti seluruh variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 76,8%, sisanya sebesar 23,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## **6. Kesimpulan, Keterbatasan Penelitian dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil koefisien t hitung menunjukkan bahwa variabel penerapan akuntansi sektor publik (X1) mempunyai nilai t hitung lebih besar dari t tabel atau dapat dikatakan variabel penerapan akuntansi sektor publik (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Hasil kuisioner juga menyatakan bahwa instansi terkait telah melakukan analisis transaksi keuangan dengan baik dan telah disertai bukti pendukung serta pencatatan dilakukan secara berurutan sesuai dengan kronologi, namun proses klasifikasi/pengelompokkan pada setiap transaksi yang terjadi di instansi terkait belum maksimal dan pelaporan keuangan yang dilakukan secara konsisten dan periodik belum dapat diwujudkan. Berdasarkan hasil di atas, maka dapat dikatakan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penerapan akuntansi sektor publik yang baik akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas (2012) dan teori yang dipaparkan oleh Bastian (2010).

2. Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil koefisien t hitung menunjukkan bahwa variabel kualitas laporan keuangan (X2) mempunyai nilai t hitung lebih besar dari t tabel atau dapat dikatakan variabel kualitas laporan keuangan (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Hasil kuisioner juga menyatakan bahwa instansi terkait telah menghasilkan laporan keuangan yang memuat informasi yang memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu dengan baik, namun laporan keuangan dihasilkan belum menyajikan informasi keuangan yang lengkap. Berdasarkan hasil di atas, maka dapat dikatakan bahwa kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena dengan adanya laporan keuangan yang baik dan berkualitas akan berindikasi pada akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang dibuat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2008) dan Pamungkas (2012).
3. Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 dan nilai f hitung lebih besar dari f tabel maka H3 diterima menunjukkan variabel penerapan akuntansi sektor publik (X1) dan kualitas laporan keuangan (X2) berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Hal ini juga dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi yang mengungkapkan bahwa variabel independen (penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) sebesar 76,8%. Hasil kuisioner juga menyatakan bahwa instansi terkait telah menghasilkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang digunakan sebahai pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan tahun selanjutnya dengan baik, namun pada pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan belum dilaksanakan secara maksimal dan proses penyampaian LAKIP disampaikan selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir juga belum dapat diwujudkan. Berdasarkan hasil di atas, maka dapat dikatakan bahwa penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan apabila akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku dalam hal ini penerapan akuntansi sektor publik maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan penelitian Pamungkas (2012), Nugraeni (2015), Wina (2015) dan Marlina (2018).

### Saran

Berdasarkan keimpulan di atas, adapun saran yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penerapan akuntansi sektor publik dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah pegawai yang profesional di bidang akuntansi. Instansi terkait dapat mengikuti atau mengadakan pelatihan akuntansi setiap tahunnya untuk para pegawai sehingga kompetensi para pegawai terkait dengan pemahaman akuntansi dalam hal ini pengklasifikasian akun dalam laporan keuangan dan pelaporan keuangan dalam hal ini secara konsisten dan periodik melakukan pelaporan keuangan dapat meningkat dan berimplikasi pada peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Peningkatan kualitas laporan keuangan dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyajian laporan keuangan. Instansi terkait dapat mencatat dan menulis transaksi yang terjadi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara lengkap dan mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan guna

- meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Peningkatan penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan dapat dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku dalam hal ini penerapan akuntansi sektor publik sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat diraih. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga dapat dilakukan dengan meningkatkan pemahaman dan komitmen setiap pimpinan instansi serta unit kerja dalam menerapkan Sistem AKIP dan menyusun LAKIP berdasarkan kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah sehingga dapat memperbaiki proses pengukuran kinerja dan meningkatkan atau mempercepat proses penyampaian LAKIP.
  4. Kepada peneliti selanjutnya agar memperluas objek penelitian, tidak hanya satu instansi saja sehingga dapat dijadikan acuan bagi kepentingan umum atau juga dapat menambah populasi penelitian dan diharapkan menambah factor-faktor lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## References

- Bastian, Indra.(2010). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Herawati, Helmi.(2019). *Pentingnya Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan*. Jurnal Akuntansi Unihaz – JAZ – 2 (1)
- Kasmir.(2008). Analisis Laporan Keuangan. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Madiarsmo.(2009). Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Marlena, S dan Subaeti.(2018). *Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu (Studi Kasus : BPKD, Inspektorat, DPMD dan DPRD di Provinsi Bengkulu)*. Jurnal Akuntansi Unihaz -JAZ- . 1 (2)
- Nordiawan, Deddi dan Hertianti, Ayuningtyas.(2014). Akuntansi Sektor Publik Edisi 2. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Nugraeni dan Budiantara, M.(2015). *Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja*. Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis. 12 (1)
- Pamungkas, Bambang.(2012). *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Peraturan Perundangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jurnal Ilmiah Ranggagading. 12 (1)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Rabuisa, W. F., Runtu, Treesje dan Wokas, Heinca.(2018). *Analisis Laporan Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dana Raya Manado*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. 13 (2)
- Santoso, Urip dan Pambelum, Y. J.(2008). *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud*. **Jurnal Administrasi Bisnis**. 4(1)
- Sanusi, Anwar. (2011). **Melodologi Penelitian Bisnis**. CV.Afabeta, Bandung.
- SK Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 *tentang pedoman penyusunan dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah*.
- Sugiyono.(2011). **Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D**.CV Alfabeta, Bandung.
- \_\_\_\_\_.(2016). **Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)**. CV Alfabeta, Bandung.
- Wina, Intan P. H dan Khairani, S.(2015). *Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Dispenda Prov, Dispenda Kota, dan Dishub Prov)*. **Jurnal STIE MDP**. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Multi Data Palembang, Sumatra Selatan.